



Catatan Informasi mengenai Proses Multi-Stakeholder

oleh The Proforest Initiative

Catatan informasi ini merupakan pelengkap dari Pedoman Penggunaan SSL REDD+ di Tingkat Negara, yang mencakup pedoman wajib dan saran praktek yang baik terkait bagaimana menggunakan SSL REDD+ di tingkat negara atau negara bagian. Catatan ini memberikan panduan tambahan mengenai bagaimana bekerja sama dengan kelompok banyak pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) yang terlibat dalam pengambilan keputusan seputar Standar Sosial dan Lingkungan REDD+. Catatan ini terutama dirancang untuk membantu pembentukan dan pengelolaan Komite Standar di tingkat negara.

Melaksanakan pendekatan *multi-stakeholder* merupakan inti dari penggunaan Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ di tingkat negara. Proses *multi-stakeholder* hendaknya melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, Masyarakat Adat, dan masyarakat setempat, serta sektor swasta di dalam pengembangan, peninjauan, dan persetujuan indikator spesifik menurut negara dan laporan asesmen kinerja program REDD+ terhadap indikatornya.

Alasan penggunaan pendekatan *multi-stakeholder* adalah untuk:

- Menciptakan suatu wadah untuk membangun konsensus dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan yang beragam, termasuk perempuan dan kelompok rentan
- Meningkatkan kualitas dan kredibilitas penilaian diri dari *multi-stakeholder*
- Mendorong kepemilikan bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Menggunakan konsultasi *multi stakeholder* dalam mengembangkan indikator dan proses asesmen:

- Memastikan standar dan proses penilaian itu relevan dan bermakna
- Membangun pemahaman dan kepemilikan dari pemangku hak dan pemangku kepentingan.

Apa itu Proses Multi-Stakeholder?

Istilah proses banyak pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) menggambarkan proses untuk menyatukan semua pemangku kepentingan kunci untuk berkomunikasi mengenai (dan kadang kala membuat keputusan mengenai) isu tertentu. Proses ini dilakukan menurut prinsip demokrasi, yaitu transparansi dan partisipasi, dan bertujuan untuk membangun kemitraan dan memperkuat jaringan antara pemangku kepentingan (Hemmati 2001).



PEMANGKU KEPENTINGAN adalah mereka yang memiliki kepentingan dalam keputusan, proyek, atau organisasi tertentu; mereka adalah orang atau wakil dari organisasi yang mempunyai pengaruh dalam keputusan, proyek, atau organisasi dan/atau mereka yang terkena dampaknya.

Menurut definisi di Hemmati, M. 2002. *Proses Multi-stakeholder untuk Pemerintahan dan Keberlanjutan: Di luar Jalan Buntu dan Konflik*. London. Earthscan

Terdapat banyak jenis Proses Multi-Stakeholder: Beberapa perbedaan penting

Proses konsultasi multi-stakeholder

Ini mengacu pada proses yang bertujuan untuk berkonsultasi secara luas, dan memaksimalkan peluang untuk turut terlibat. Namun, meski opini pemangku kepentingan hampir pasti akan mempengaruhi pengambilan keputusan, keputusan akhir akan diambil dalam proses dimana mereka tidak harus terlibat secara langsung.

Contoh: Pemerintah dapat melaksanakan konsultasi *multi-stakeholder* mengenai kebijakan atau undang-undang REDD+ untuk memahami kecemasan dan kepentingan yang ada. Konsultasi ini memberikan informasi sebelum pemerintah mengambil keputusan. Keputusan tersebut biasanya diambil di Dewan Perwakilan Rakyat atau badan ekuivalen lain.

Proses pengambilan keputusan multi-stakeholder

Ini mengacu pada proses dimana wakil-wakil kelompok pemangku kepentingan kunci duduk bersama di dalam suatu mekanisme yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan menggunakan proses demokratis: artinya lebih dari mengutarakan pendapat.

Contoh: Sekelompok perwakilan dari berbagai sektor (masyarakat sipil, industri, petani, keuangan, pemerintah) dibentuk untuk menyepakati serangkaian prinsip sukarela untuk pertanian berkelanjutan yang akan digunakan dalam skema sertifikasi sukarela. Kelompok ini diberdayakan untuk membuat keputusan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Menggabungkan keduanya

Seringkali, kedua jenis proses tersebut digunakan bersamaan di dalam proyek yang sama, misalnya proses *pengambilan keputusan* multi stakeholder seringkali juga menggunakan proses *konsultasi* multi-stakeholder agar lebih efektif.

Contoh: Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja sama di komite tingkat nasional untuk menerapkan sistem rambu pengaman REDD+ menggunakan standar SSL REDD+ dan mengikuti Pedoman SSL REDD+ akan menggunakan kedua jenis proses tersebut. Mereka umumnya akan membentuk komite mereka sebagai proses pengambilan keputusan *multi-stakeholder*, dan menggunakan konsultasi *multi-stakeholder* ketika mencari pendapat mengenai draf indikator, dan laporan monitoring.

Beberapa elemen kunci untuk menjalankan proses *multi-stakeholder* untuk program REDD+ atau Sistem Informasi Rambu Pengaman

Tim fasilitasi dan organisasi pimpinan (misalnya pemerintah, LSM)

Mempersiapkan kegiatan anda

- **Tujuan** proses anda harus jelas: apa yang anda berusaha capai?
- **Pastikan kejelasan peran dan tanggung jawab** dari awal: siapa yang melakukan apa?
 - Tuliskan. Anda dapat memodifikasinya nanti seiring berjalannya proses.
- **Pastikan adanya transparansi**, edarkan informasi menggunakan metode komunikasi yang tepat: buatlah tersedia bagi publik.
- Diskusikan dan **libatkan pemangku kepentingan lain sejak awal** dalam merancang proses ini.
- Pastikan tujuan dan kegiatan sejalan dengan sumber daya yang tersedia.

Pemangku kepentingan

- Lakukan **pemetaan pemangku kepentingan** awal: kenali kelompok kunci yang harus didekati dan dilibatkan
 - Ini hanyalah pemetaan awal: tetap buka pintu untuk kelompok lain.
- **Berkonsultasilah dengan kelompok pemangku kepentingan potensial** untuk mengkaji kepentingan mereka dan meminta masukan mereka terhadap perancangan proses sejak awal.

Masukan

- **Persiapkan draf** Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR), norma kelompok dalam pengambilan keputusan, peran, struktur dan keanggotaan, untuk kelompok pengambil keputusan inti (misalnya Komite Standar atau yang setara dengan itu)
 - **Bersikap fleksibel**: hal yang disebutkan diatas hendaknya disempurnakan dan disetujui oleh kelompok itu sendiri.

Pengambilan keputusan atau kelompok yang memberikan informasi sebagai bahan untuk mengambil keputusan tersebut (misalnya Komite Standar *multi-stakeholder*)

Salah satu elemen kunci dalam menggunakan SSL REDD+ adalah pembentukan komite *multi-stakeholder* untuk mengawasi dan mendukung penggunaan SSL REDD+ dalam suatu negara. Fungsi pengambilan keputusan komite tersebut meliputi menentukan indikator di tingkat negara, dan menyetujui laporan terkait kinerja sosial dan lingkungan dari program REDD+.

Partisipasi dan keterwakilan

- **Berikan informasi & jelaskan**: pemangku kepentingan perlu memahami proses apa yang akan mereka lakukan, mengapa ini mungkin penting bagi mereka, dan apa komitmen yang dibutuhkan dari mereka, agar mereka dapat memutuskan ingin terlibat atau tidak. Dokumen sederhana yang berisi tujuan dan proses yang diusulkan akan membantu.
- **Transparansi**: untuk membangun kepercayaan, orang harus memahami bagaimana prosesnya jika mereka ingin terlibat, membuat keputusan dan bagaimana masukan mereka akan digunakan.
- **Legitimasi**: legitimasi kelompok yang terlibat dan wakil mereka secara langsung mempengaruhi legitimasi proses.
 - Kelompok kepentingan hendaknya memilih sendiri wakil mereka
 - Para wakil hendaknya mengkoordinasikan masukan dan umpan balik mereka kepada orang yang mereka wakili.
- **Inklusifitas (Ketercakupan)**: Seharusnya tidak ada kelompok pemangku kepentingan relevan yang tidak diikutsertakan untuk berpartisipasi, apabila mereka berminat untuk berpartisipasi.
 - Apabila terdapat banyak orang dari kelompok pemangku kepentingan tertentu yang ingin terlibat, sub-kelompok atau 'kelompok konsultatif' dapat dibentuk, dimana mereka dapat memilih seorang atau banyak wakil yang akan duduk di komite tingkat negara.

Partisipasi penuh dan efektif

- Pembangunan Kapasitas mungkin diperlukan: hindari berasumsi orang memiliki pelatihan atau pengetahuan tentang proses atau konsep tertentu
- Untuk membiarkan berbagai kelompok yang berbeda terlibat penuh dalam debat, mungkin beberapa kelompok perlu menghadirkan lebih dari satu orang wakil ; terutama jika mereka baru menghadapi proses seperti ini, atau tidak fasih berbicara bahasa yang digunakan dalam proses ini (namun dalam *voting*, mereka hanya diperbolehkan memiliki satu suara)
- Tetap berikan informasi dan libatkan pemangku kepentingan yang tidak berpartisipasi:
 - Pertimbangkan menyediakan mekanisme bagi kelompok yang tidak ingin mengikuti proses formal, agar mereka dapat membagikan pandangan mereka terhadap permasalahan yang ada (misalnya melalui rapat yang difasilitasi secara terpisah)
 - Pertimbangkan untuk menugaskan kelompok inti untuk membantu mencari cara agar kelompok berkepentingan dapat mengutarakan pandangan dan pendapat mereka dengan cara-cara yang berbeda.



“Upayakan mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan yang akan terkena dampak REDD+, seperti Masyarakat Adat, Masyarakat Setempat dan Pemangku Kepentingan Kecil, serta mereka yang memiliki kepentingan ekonomi dalam REDD+, seperti perusahaan kayu, penghasil pertanian berskala besar, perusahaan konsultan yang terlibat dalam pengembangan proyek, organisasi sertifikasi, bank, firma hukum, dll. Selain itu, kenali dan cantumkan dalam daftar pemangku kepentingan anda, organisasi lainnya, seperti institusi pembelajaran lebih tinggi dan institusi penelitian yang mungkin memiliki informasi teknis yang berguna bagi proses ini.

Brazilian Civil society REDD+Safeguards publication



Pembentukan kelompok pengambil keputusan

- Jumlah anggota kelompok harus mudah dikelola (jumlah rekomendasi maksimal adalah 25 orang)
 - Mengembangkan komposisi kelompok yang ideal (keseimbangan antar sektor, geografis, dll.)
 - Mengembangkan kriteria untuk memilih anggota yang tepat:
 - Mereka menyuarakan pandangan pemangku kepentingan di sektor mereka & akan memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan tersebut (komunikasi 2 arah)
 - Bersedia berkomitmen terhadap proses ini
 - Terbuka untuk mendengarkan, berkontribusi, dan berdebat secara konstruktif
- Manajemen adaptif: jangan tutup pintu sepenuhnya. Bersikaplah terbuka jika harus memperluas kelompok apabila ada pemangku kepentingan penting tambahan yang teridentifikasi dan ingin bergabung.

Mulai bekerja dengan kelompok

- Di awal proses, anggota komite sebaiknya menyepakati:
 - Mandat yang diberikan kepada komite – Kerangka Acuan Kerja, peran, dan struktur
 - Prosedur pengambilan keputusan – bahkan bila anda berharap untuk mengambil semua keputusan melalui konsensus
 - Mekanisme penyelesaian konflik – digunakan apabila ada hal-hal yang tidak berjalan lancar
- Komite sebaiknya melihat kembali pemetaan pemangku kepentingan, dan menambahkannya, bila perlu.

Isu-isu Praktis untuk rapat dan dialog

- **Pilih fasilitator yang netral dan terpercaya** untuk memandu prosesnya
- **Konsistensi partisipasi** merupakan hal yang penting
 - Mintalah peserta untuk berkomitmen untuk datang ke rapat dan mengajukan satu nama alternatif apabila mereka tidak dapat datang ke rapat.
 - Mintalah mereka untuk bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada pengganti tersebut sebelum rapat, dan memperoleh *update* dari pengganti mereka setelah rapat tersebut.
- Pertimbangkan kebutuhan akan komunikasi
 - Tawarkan penerjemahan langsung (*simultaneous translation*) jika hal ini dapat meningkatkan inklusifitas dan transparansi
 - Gunakan berbagai cara untuk berkomunikasi guna membuat orang tetap terlibat (misalnya visual, oral, aktif, pasif)
- Pertimbangkan waktu dan kebutuhan/hambatan mobilisasi (misalnya pemangku kepentingan yang harus menempuh jarak yang jauh untuk datang ke rapat).
- **Buat luaran dari rapat dan konsultasi tersedia** bagi pemangku kepentingan yang berpartisipasi, pemangku kepentingan yang tidak berpartisipasi, dan publik.

“ Saat membentuk Komite *Multi-Stakeholder*, cobalah untuk menyeimbangkan jumlah wakil dari masing-masing sektor untuk mencegah diabaikannya kelompok minoritas dalam diskusi. Lebih dari itu, ketidakseimbangan sektoral dalam penyusunan dokumen dapat menjadi faktor penghambat serius terhadap kredibilitas dan legitimasi produk akhir yang dihasilkan.

Brazilian Civil society REDD+Safeguards publication

”



Cara yang baik untuk mendorong umpan balik adalah membuat anggota komite *multi-stakeholder* bertanggung jawab dalam menyebarkan draf untuk sektor mereka sendiri, dan meminta umpan balik dari draf tersebut.

Mekanisme Pengambilan Keputusan untuk Kelompok Inti (Komite, atau Kelompok Kerja)

Sebagian besar kelompok bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Akan tetapi, menentukan dan menyepakati aturan untuk mekanisme pengambilan keputusan alternatif merupakan jaring pengaman yang krusial apabila konsensus tidak mungkin dicapai. Mekanisme tersebut sebaiknya diatur seadil mungkin: artinya tidak ada satu kelompok yang dapat mendominasi dan tidak ada kelompok pemangku kepentingan yang dapat terpinggirkan. Sistem 'voting menurut sektor' telah terbukti efektif dalam proses *multi-stakeholder* lainnya.

- **Konsensus:** keputusan dibuat ketika tidak ada pihak yang terlibat yang mengajukan keberatan yang keras atau serius, artinya semua pihak bersedia 'menerima' keputusan (lihat definisi ISEAL di bawah ini).
- **Pengambilan suara mayoritas:** keputusan dibuat ketika proporsi yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 50% atau 75%) dari seluruh anggota kelompok mendukung.
- **Pengambilan suara (Voting) menurut sektor:** anggota kelompok dibagi menurut sektor (misalnya kelompok kepentingan dibagi menjadi kamar, konstituen, atau pengelompokan lainnya). Agar keputusan dapat disetujui, harus terdapat proporsi yang telah ditentukan dari semua anggota mendukung (misalnya 60% atau 75% dari total kekuatan *voting*) **ditambah** ambang batas yang telah ditentukan (misalnya 'mayoritas sederhana' sebesar 51%) di masing-masing sektor.

KONSENSUS "Kesepakatan umum, yang dicirikan oleh a) tidak adanya perlawanan berkelanjutan terhadap isu substansial oleh segala bagian dari kepentingan yang ada, dan b) proses yang bertujuan untuk mempertimbangkan pandangan para pihak yang berkepentingan, terutama mereka yang secara langsung terkena dampak, dan untuk merekonsiliasi segala pendapat yang berbenturan. CATATAN – Konsensus bukan berarti semua pihak setuju"

ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards, 2006. Berdasarkan Pedoman ISO/IEC 2:2004

Konsultasi *multi-stakeholder* yang lebih luas: memberikan informasi, meningkatkan keterlibatan, mencari masukan

Transparansi

- Menciptakan mekanisme yang efektif dan transparan guna mengikutsertakan komentar ke dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya mengatur komentar dengan tabel berdasarkan tema, dan sediakan satu kolom agar para pengambil keputusan dapat mencatat bagaimana mereka menanggapi komentar tersebut.
- Catat dan simpan statistik tentang siapa saja yang kami konsultasikan (komentar, jumlah, jender, kategori).

Inklusifitas dan Keadilan

- Dukungan dan pembangunan kapasitas mungkin diperlukan demi efektifitas keterlibatan
- Serahkan prosesnya kepada masyarakat:
 - hormati tantangan waktu setempat dan cara mereka untuk terlibat (contoh, sebagian masyarakat mungkin jarang mengadakan pertemuan, atau harus menyepakati komentar mereka melalui hierarki internal)
 - selenggarakan lokakarya lokal dan regional
 - jangan hanya mengandalkan konsultasi berbasis web atau berbasis dokumen
 - gunakan metodologi partisipatif dan bahasa yang tepat: jangan terlalu teknis.
- Sediakan cara memberikan masukan tanpa harus memberikan persetujuan
- Ikut sertakan mereka yang mungkin tidak setuju
- Ingat mitos 'masyarakat homogen':
 - jangan hanya berkonsultasi dengan pimpinan
 - perempuan dan laki-laki akan terlibat dengan cara yang berbeda: pertimbangkan untuk mengadakan rapat yang terpisah
- Pertimbangkan sub-grup khusus bagi 'kelompok terpinggirkan dan/atau rentan' untuk memastikan suara mereka didengar

Efektifitas dan Legitimasi

- Komunikasi dua arah: berikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana menggunakan komentar yang ada.

Sumber referensi yang dapat bermanfaat

Developing Social and Environmental Safeguards for REDD+: a guide for bottom-up approach (Mengembangkan Rambu Pengaman Sosial dan Lingkungan untuk REDD+: pedoman untuk pendekatan dari bawah ke atas). 2010, pengalaman dan saran dari inisiatif LSM di Brazil terkait pengembangan rambu pengaman. Tersedia dalam Bahasa Spanyol, Inggris, Portugis, dan Perancis dari www.imaflora.org.br

Joint UN-REDD and FCPF DRAFT Guidelines on Stakeholder Engagement in REDD+ Readiness (Draf Pedoman Bersama UN-REDD dan FCPF mengenai Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam rangka Kesiapan REDD+) : Dengan fokus pada partisipasi Masyarakat Adat dan masyarakat lain yang tergantung pada hutan, draf - 18 Mei 2011. Tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol dari www.forestcarbonpartnership.org

Lembaran fakta ini dikembangkan oleh The Proforest Initiative (www.proforestinitiative.org). Untuk mempelajari lebih jauh mengenai inisiatif SSL REDD+, kunjungi www.redd-standards.org atau hubungi sekretariat internasional.

Joanna Durbin

Director

Climate, Community & Biodiversity Alliance

jdurbin@climate-standards.org

+ 1 703 623 4441

Aurélie Lhumeau

REDD+SES Advisor

Climate, Community & Biodiversity Alliance

alhumeau@redd-standards.org

+1 703 623 2568

Phil Franks

Global Coordinator

CARE International

pfranks@careclimatechange.org

+ 254 716 430353



Kepercayaan yang lebih luas terhadap proses dan hasil akhir akan terjadi apabila anda telah **melibatkan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda**

